



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.667800/2024**



DS:9679-0671-5281-0856

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
4. Kode>Nama Satker : (667800) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 293.729.000 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.WA Program Dukungan Manajemen

013.11.WA. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	293.729.000
Rp.	293.729.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 293.729.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 293.729.000

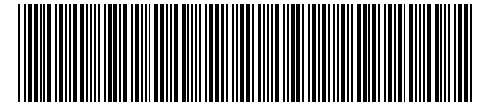
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667800/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:9679-0671-5281-0856

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667800) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.11.WA	Program Dukungan Manajemen			293.729.000
Kegiatan	:	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			293.729.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	293.729.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	4,00	Rekomendasi Kebijakan	274.829.000
		02 ABD.002	Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	18.900.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667800/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9679-0671-5281-0856

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667800) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
667800	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	293.729	-	-	-	293.729	34 . 51	
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	293.729	-	-	-	293.729		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	293.729	-	-	-	293.729		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	293.729	-	-	-	293.729		
01	RM	-	293.729	-	-	-	293.729		
JUMLAH		-	293.729	-	-	-	293.729		

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667800/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9679-0671-5281-0856

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667800) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	667800	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT														
		RENCANA PENARIKAN DANA	14.076	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	26.411	15.409	11.425	293.729
		BELANJA BARANG	14.076	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	26.411	15.409	11.425	293.729
	013.11.WA.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	14.076	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	26.411	15.409	11.425	293.729
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	14.076	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	28.301	26.411	15.409	11.425	293.729

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667800/2024
IV A. B L O K I R**



DS:9679-0671-5281-0856

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667800] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

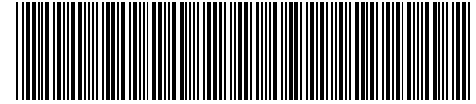
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.11.2.667800/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:9679-0671-5281-0856

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667800] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

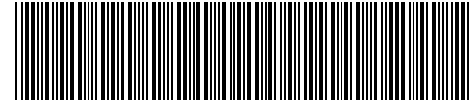
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

ttd.
Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
NIP. 196503221987031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.667799/2024**



DS:2646-0062-6105-5235

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
4. Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 1.137.137.000 (SATU MILIAR SERATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA SERATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.137.137.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 1.137.137.000

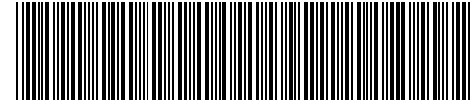
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2024



DS:2646-0062-6105-5235

Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	140.505.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	140.505.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	996.632.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	996.632.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



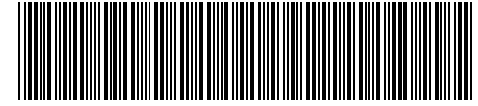
DS:2646-0062-6105-5235

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			140.505.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			140.505.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan			
		2. 02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	40.301.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	40.301.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	100.204.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	100.204.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			996.632.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			996.632.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah			
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum litigasi			
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap dari usulan kantor wilayah			
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan/permintaan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	98.051.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	10,00	Lembaga	98.051.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat	209.825.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	85.117.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2646-0062-6105-5235

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 2

		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			Kelompok Masyarakat		
	02	BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum		5.00	Kelompok Masyarakat	124.708.000
Klasifikasi Rincian Output	3	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6.00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	73.866.000
Rincian Output	:	01	BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	6.00	Lembaga	73.866.000
Klasifikasi Rincian Output	4	4841.PDE	Akreditasi Lembaga		6.00	Lembaga, Unit Kerja	76.200.000
Rincian Output	:	01	PDE.001	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah (PN)	6.00	Lembaga	76.200.000
Klasifikasi Rincian Output	5	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		58.00	Orang	464.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	58.00	Orang	464.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		7.00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	74.690.000
Rincian Output	:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	7.00	Kegiatan	74.690.000

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

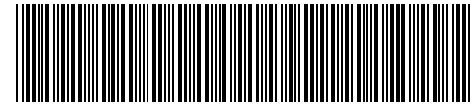
ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2024

I B. SUMBER DANA



DS:2646-0062-6105-5235

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	1.137.137.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.137.137.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

Pagu

Ekuivalen Rupiah

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



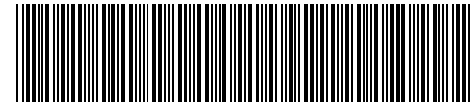
DS:2646-0062-6105-5235

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667799	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	1.137.137	-	-	-	1.137.137		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	140.505	-	-	-	140.505		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	140.505	-	-	-	140.505		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	40.301	-	-	-	40.301	34 . 51	
01	RM	-	40.301	-	-	-	40.301	178	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	100.204	-	-	-	100.204	34 . 51	
01	RM	-	100.204	-	-	-	100.204	178	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	996.632	-	-	-	996.632		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	996.632	-	-	-	996.632		
4841.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	98.051	-	-	-	98.051	34 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



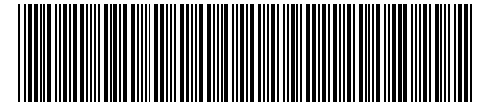
DS:2646-0062-6105-5235

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	98.051	-	-	-	98.051	178	
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	209.825	-	-	-	209.825	34 . 51	
01 RM		-	209.825	-	-	-	209.825	178	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	73.866	-	-	-	73.866	34 . 51	
01 RM		-	73.866	-	-	-	73.866	178	
4841.PDE	Akreditasi Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	76.200	-	-	-	76.200	34 . 51	
01 RM		-	76.200	-	-	-	76.200	178	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	464.000	-	-	-	464.000	34 . 51	
01 RM		-	464.000	-	-	-	464.000	178	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2646-0062-6105-5235

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

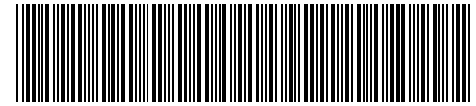
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	74.690	-	-	-	74.690	34 . 51	
01 RM		-	74.690	-	-	-	74.690	178	
JUMLAH		-	1.137.137	-	-	-	1.137.137		

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2646-0062-6105-5235

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667799) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

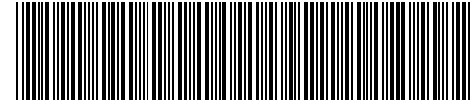
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667799	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	129.977	165.472	165.252	110.175	64.023	138.635	116.173	66.806	59.147	77.739	43.737	1.137.137
		BELANJA BARANG	0	129.977	165.472	165.252	110.175	64.023	138.635	116.173	66.806	59.147	77.739	43.737	1.137.137
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	18.060	13.100	21.628	9.117	0	140.505
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	18.060	13.100	21.628	9.117	0	140.505
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	116.877	152.372	152.152	97.075	50.924	125.535	98.113	53.706	37.519	68.622	43.737	996.632
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	116.877	152.372	152.152	97.075	50.924	125.535	98.113	53.706	37.519	68.622	43.737	996.632

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2024
IV A. B L O K I R**



DS:2646-0062-6105-5235

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667799] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.10.2.667799/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:2646-0062-6105-5235

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667799] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

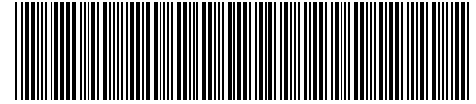
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.667798/2024**



DS:7357-6004-8848-0485

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
4. Kode/Nama Satker : (667798) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 262.548.000 (DUA RATUS ENAM PULUH DUA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM
013.09.BG. Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 262.548.000
Rp. 262.548.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	262.548.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 262.548.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.09.2.667798/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7357-6004-8848-0485

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667798) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM			262.548.000
Kegiatan	:	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			262.548.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
		2. 01	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			
		3. 02	Jumlah kab/kota peduli HAM			
		4. 03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	28.430.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	1,00	layanan	28.430.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	41.815.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1,00	Lembaga	41.815.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	192.303.000
Rincian Output	:	01 FBA.001	Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah	3,00	Kab/Kota	82.587.000
		02 FBA.002	Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	3,00	Kab/Kota	44.641.000
		03 FBA.003	Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah	3,00	Kab/Kota	62.975.000
		04 FBA.004	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.100.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

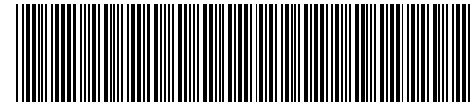
ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.09.2.667798/2024

I B. SUMBER DANA



DS:7357-6004-8848-0485

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
 Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 Kode>Nama Satker : (667798) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	262.548.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	262.548.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.09.2.667798/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7357-6004-8848-0485

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667798) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

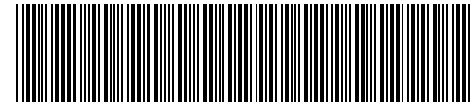
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667798	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	262.548	-	-	-	262.548		
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	262.548	-	-	-	262.548		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	262.548	-	-	-	262.548		
5255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	28.430	-	-	-	28.430	34 . 51	
01	RM	-	28.430	-	-	-	28.430	178	
5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	41.815	-	-	-	41.815	34 . 51	
01	RM	-	41.815	-	-	-	41.815	178	
5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	192.303	-	-	-	192.303	34 . 51	
01	RM	-	192.303	-	-	-	192.303	178	
JUMLAH		-	262.548	-	-	-	262.548		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.09.2.667798/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7357-6004-8848-0485

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667798) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

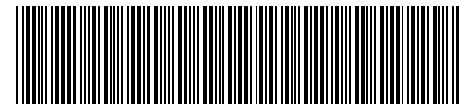
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667798	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	6.057	26.968	25.243	33.463	22.381	21.273	25.318	25.110	25.192	22.324	19.509	9.710	262.548
		BELANJA BARANG	6.057	26.968	25.243	33.463	22.381	21.273	25.318	25.110	25.192	22.324	19.509	9.710	262.548
	013.09.BG.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	6.057	26.968	25.243	33.463	22.381	21.273	25.318	25.110	25.192	22.324	19.509	9.710	262.548
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	6.057	26.968	25.243	33.463	22.381	21.273	25.318	25.110	25.192	22.324	19.509	9.710	262.548

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.09.2.667798/2024
IV A. B L O K I R**



DS:7357-6004-8848-0485

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667798] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.09.2.667798/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:7357-6004-8848-0485

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667798] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

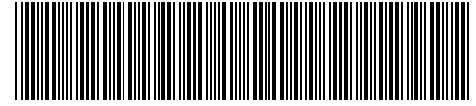
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.667797/2024**



DS:6755-1136-0687-1410

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
4. Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 472.000.000 (EMPAT RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi

013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 472.000.000
Rp. 472.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	472.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 472.000.000

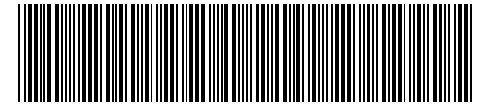
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6755-1136-0687-1410

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			472.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			472.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	402.317.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	5,00	Rekomendasi Kebijakan	402.317.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	13,00	Orang	69.683.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	13,00	Orang	69.683.000

Jakarta, 24 November 2023

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

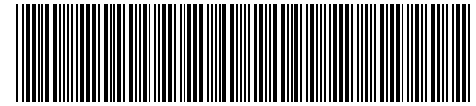
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2024

I B. SUMBER DANA



DS:6755-1136-0687-1410

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	472.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	472.000.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6755-1136-0687-1410

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667797	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	472.000	-	-	-	472.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	472.000	-	-	-	472.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	472.000	-	-	-	472.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	402.317	-	-	-	402.317	34 . 51	
01	RM	-	402.317	-	-	-	402.317	178	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	69.683	-	-	-	69.683	34 . 51	
01	RM	-	69.683	-	-	-	69.683	178	
JUMLAH		-	472.000	-	-	-	472.000		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6755-1136-0687-1410

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667797) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

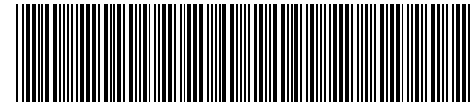
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667797	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	13.060	26.971	30.664	60.341	42.164	34.048	38.100	68.482	65.566	46.804	26.694	19.106	472.000
		BELANJA BARANG	13.060	26.971	30.664	60.341	42.164	34.048	38.100	68.482	65.566	46.804	26.694	19.106	472.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	13.060	26.971	30.664	60.341	42.164	34.048	38.100	68.482	65.566	46.804	26.694	19.106	472.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	13.060	26.971	30.664	60.341	42.164	34.048	38.100	68.482	65.566	46.804	26.694	19.106	472.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2024
IV A. B L O K I R**



DS:6755-1136-0687-1410

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667797] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

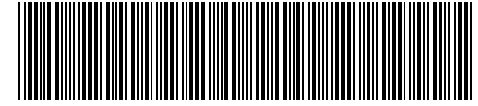
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.667797/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:6755-1136-0687-1410

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667797] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.07.2.667796/2024**



DS:0969-4547-8946-0573

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
 3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 4. Kode/Nama Satker : (667796) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 1.750.077.000 (SATU MILIAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.07.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.07.BF.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 1.750.077.000
Rp. 1.750.077.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 1.750.077.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 1.750.077.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.07.2.667796/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0969-4547-8946-0573

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667796) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.750.077.000
Kegiatan	:	5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			1.750.077.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Penegakan hukum KI di Wilayah			
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah			
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5253.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	870,00	Orang	1.622.644.000
Rincian Output	:	01 BDC.001	Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	600.00	Orang	1.013.164.000
		02 BDC.002	Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	100.00	Orang	129.254.000
		03 BDC.003	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	170.00	Orang	480.226.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5253.BKB	Pemantauan produk	5,00	laporan	127.433.000
Rincian Output	:	01 BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	5,00	laporan	127.433.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
MIN USIHEN, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.07.2.667796/2024



DS:0969-4547-8946-0573

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
 Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 Kode>Nama Satker : (667796) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

			Pagu				Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	1.750.077.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	1.750.077.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.07.2.667796/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0969-4547-8946-0573

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667796) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

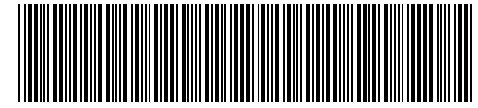
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667796	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	1.750.077	-	-	-	1.750.077		
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.750.077	-	-	-	1.750.077		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	1.750.077	-	-	-	1.750.077		
5253.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	1.622.644	-	-	-	1.622.644	34 . 51	
04	PNBP	-	1.622.644	-	-	-	1.622.644	178	
5253.BKB	Pemantauan produk (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	127.433	-	-	-	127.433	34 . 51	
04	PNBP	-	127.433	-	-	-	127.433	178	
JUMLAH		-	1.750.077	-	-	-	1.750.077		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
MIN USIHEN, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.07.2.667796/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0969-4547-8946-0573

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667796) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

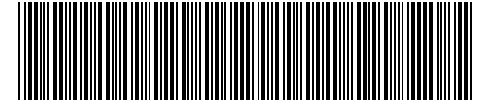
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667796	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	205.751	255.958	87.752	159.231	189.888	230.835	184.071	201.579	90.552	103.450	41.010	1.750.077
		BELANJA BARANG	0	205.751	255.958	87.752	159.231	189.888	230.835	184.071	201.579	90.552	103.450	41.010	1.750.077
	013.07.BF.5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	205.751	255.958	87.752	159.231	189.888	230.835	184.071	201.579	90.552	103.450	41.010	1.750.077
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	205.751	255.958	87.752	159.231	189.888	230.835	184.071	201.579	90.552	103.450	41.010	1.750.077

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
MIN USIHEN, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.07.2.667796/2024
IV A. B L O K I R**



DS:0969-4547-8946-0573

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667796] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
MIN USIHEN, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.07.2.667796/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:0969-4547-8946-0573

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667796] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
MIN USIHEN, S.H., M.H.
NIP. 196903091994032001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.667795/2024**



DS:8004-4906-6238-0176

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
4. Kode>Nama Satker : (667795) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 1.471.163.000 (SATU MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA SERATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.471.163.000
013.06.BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.471.163.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	1.471.163.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 1.471.163.000

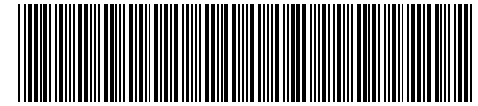
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.06.2.667795/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8004-4906-6238-0176

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667795) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.471.163.000
Kegiatan	:	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			1.471.163.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani			
		2. 01	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima			
		3. 02	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	19,00	operasi, Hari Operasi	546.391.000
Rincian Output	:	01	BHB.U01 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	12,00	operasi	272.230.000
		02	BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah	4,00	operasi	127.394.000
		03	BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah	2,00	operasi	82.967.000
		04	BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1,00	operasi	63.800.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	12,00	Orang, Laporan	808.672.000
Rincian Output	:	01	BIB.004 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	12,00	Laporan	808.672.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	2,00	laporan	116.100.000
Rincian Output	:	01	BKA.001 Pengawasan Orang Asing	2,00	laporan	116.100.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Imigrasi

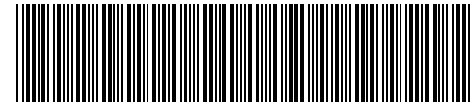
ttd.
Silmy Karim, S.E., M.E.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.06.2.667795/2024

I B. SUMBER DANA



DS:8004-4906-6238-0176

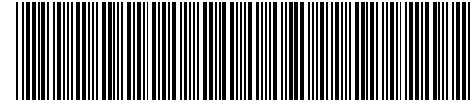
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
 Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 Kode>Nama Satker : (667795) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

		Pagu	Ekuivalen Rupiah			
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	1.471.163.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	1.471.163.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.06.2.667795/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8004-4906-6238-0176

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667795) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667795	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	1.471.163	-	-	-	1.471.163		
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.471.163	-	-	-	1.471.163		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	1.471.163	-	-	-	1.471.163		
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	546.391	-	-	-	546.391	34 . 51	
04	PNBP	-	546.391	-	-	-	546.391	178	
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	808.672	-	-	-	808.672	34 . 51	
04	PNBP	-	808.672	-	-	-	808.672	178	
5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	116.100	-	-	-	116.100	34 . 51	
04	PNBP	-	116.100	-	-	-	116.100	178	
JUMLAH		-	1.471.163	-	-	-	1.471.163		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.06.2.667795/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8004-4906-6238-0176

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667795) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

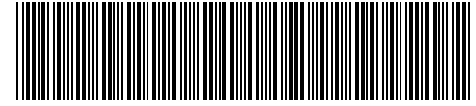
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667795	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	63.226	81.218	163.426	128.568	173.744	152.439	102.088	102.442	211.056	51.701	127.229	114.026	1.471.163
		BELANJA BARANG	63.226	81.218	163.426	128.568	173.744	152.439	102.088	102.442	211.056	51.701	127.229	114.026	1.471.163
	013.06.BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	63.226	81.218	163.426	128.568	173.744	152.439	102.088	102.442	211.056	51.701	127.229	114.026	1.471.163
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	63.226	81.218	163.426	128.568	173.744	152.439	102.088	102.442	211.056	51.701	127.229	114.026	1.471.163

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.06.2.667795/2024
IV A. B L O K I R**



DS:8004-4906-6238-0176

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667795] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

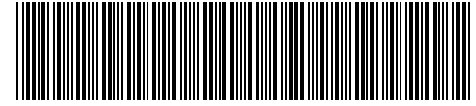
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Silmy Karim, S.E., M.E.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.06.2.667795/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:8004-4906-6238-0176

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667795] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

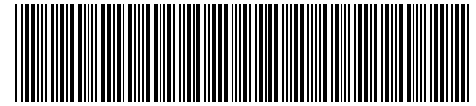
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Silmy Karim, S.E., M.E.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.667794/2024**



DS:4605-6123-8339-7967

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
4. Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 646.924.000 (ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 646.924.000
Rp. 646.924.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	646.924.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 646.924.000

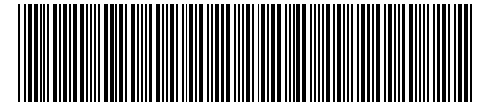
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



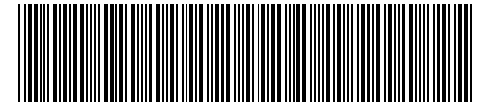
DS:4605-6123-8339-7967

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	646.924.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	646.924.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	: 22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4605-6123-8339-7967

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- 23. 04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- 24. 04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
- 25. 04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
- 26. 05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
- 27. 05 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 28. 06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- 29. 06 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 30. 07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
- 31. 07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- 32. 08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output 1	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	36,00	orang	183.471.000
Rincian Output	:	01	AEF.001 Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	36.00	orang	183.471.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	9,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	305.099.000
Rincian Output	:	01	BDB.001 Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasarakatan	9.00	Unit Kerja	305.099.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	158.354.000
Rincian Output	:	01	BHB.001 Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12.00	operasi	158.354.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

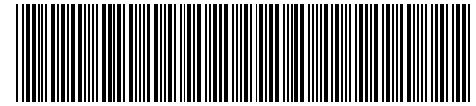
ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2024

I B. SUMBER DANA



DS:4605-6123-8339-7967

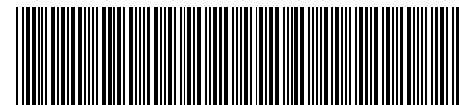
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
 Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	646.924.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	646.924.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4605-6123-8339-7967

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

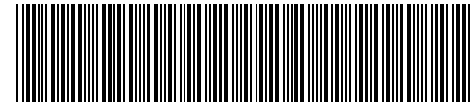
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667794	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	646.924	-	-	-	646.924		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	646.924	-	-	-	646.924		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	646.924	-	-	-	646.924		
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	183.471	-	-	-	183.471	34 . 51	
01	RM	-	183.471	-	-	-	183.471	178	
5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	305.099	-	-	-	305.099	34 . 51	
01	RM	-	305.099	-	-	-	305.099	178	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	158.354	-	-	-	158.354	34 . 51	
01	RM	-	158.354	-	-	-	158.354	178	
JUMLAH		-	646.924	-	-	-	646.924		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4605-6123-8339-7967

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667794) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667794	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	15.102	60.050	80.963	64.390	79.331	71.274	55.731	54.063	44.193	45.726	54.275	21.826	646.924
		BELANJA BARANG	15.102	60.050	80.963	64.390	79.331	71.274	55.731	54.063	44.193	45.726	54.275	21.826	646.924
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	15.102	60.050	80.963	64.390	79.331	71.274	55.731	54.063	44.193	45.726	54.275	21.826	646.924
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	15.102	60.050	80.963	64.390	79.331	71.274	55.731	54.063	44.193	45.726	54.275	21.826	646.924

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2024
IV A. B L O K I R**



DS:4605-6123-8339-7967

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667794] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

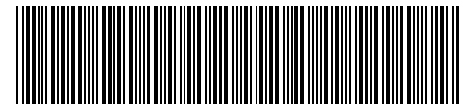
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.667794/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:4605-6123-8339-7967

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667794] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

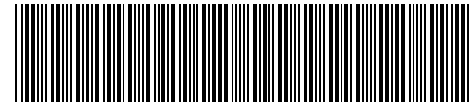
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.01.2.667790/2024**



DS:0495-2943-4000-5034

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 4. Kode>Nama Satker : (667790) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 15.056.379.000 (LIMA BELAS MILIAR LIMA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.01.WA Program Dukungan Manajemen
013.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Jumlah Uang
Rp. 15.056.379.000
Rp. 15.056.379.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	15.056.379.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 15.056.379.000

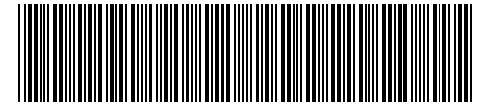
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.667790/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0495-2943-4000-5034

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667790) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.01.WA	Program Dukungan Manajemen			15.056.379.000
Kegiatan	:	1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			15.056.379.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	13.027.097.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan	215.001.000
		02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	Layanan	260.523.000
		03	EBA.959 Layanan Protokoler	1,00	Layanan	124.092.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	43.447.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	108.324.000
		06	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	12.275.710.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	24,00	Unit, m2, Paket	432.094.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	24,00	Unit	432.094.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	377.999.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1,00	Layanan	377.999.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.219.189.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	311.956.000
		02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	430.825.000
		03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	326.252.000
		04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	Dokumen	92.196.000
		05	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,00	Dokumen	57.960.000

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal

ttd.

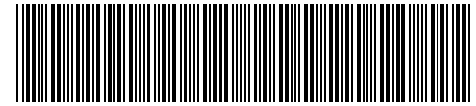
KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.01.2.667790/2024

I B. SUMBER DANA



DS:0495-2943-4000-5034

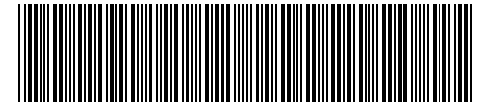
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 Kode>Nama Satker : (667790) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	15.056.379.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	15.056.379.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.667790/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



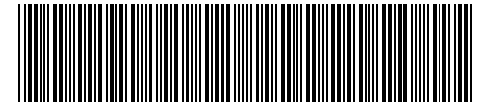
DS:0495-2943-4000-5034

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667790) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	7.248.401	7.375.884	432.094	-	-	15.056.379		
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.248.401	7.375.884	432.094	-	-	15.056.379		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7.248.401	7.375.884	432.094	-	-	15.056.379		
1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (34.00 SULAWESI BARAT / SULAWESI BARAT)	7.248.401	5.778.696	-	-	-	13.027.097	34 . 00	
01	RM	7.248.401	5.778.696	-	-	-	13.027.097	178	
1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (34.00 SULAWESI BARAT / SULAWESI BARAT)	-	-	432.094	-	-	432.094	34 . 00	
01	RM	-	-	432.094	-	-	432.094	178	
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (34.00 SULAWESI BARAT / SULAWESI BARAT)	-	377.999	-	-	-	377.999	34 . 00	
01	RM	-	377.999	-	-	-	377.999	178	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.667790/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0495-2943-4000-5034

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667790) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

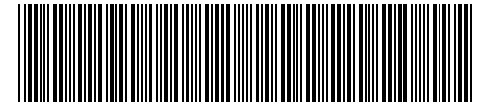
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (34.00 SULAWESI BARAT / SULAWESI BARAT)	-	1.219.189	-	-	-	1.219.189	34 . 00	
01 RM		-	1.219.189	-	-	-	1.219.189	178	
JUMLAH		7.248.401	7.375.884	432.094	-	-	15.056.379		

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal

ttd.

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.667790/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0495-2943-4000-5034

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667790) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

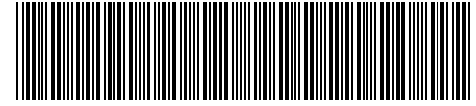
NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	878.664	1.773.640	1.417.010	1.976.118	1.040.310	1.079.507	1.697.908	1.180.309	1.030.808	1.055.216	1.116.677	810.212	15.056.379
		BELANJA PEGAWAI	512.401	519.800	519.800	1.032.800	519.800	519.800	1.032.800	519.800	519.800	519.800	519.800	512.000	7.248.401
		BELANJA BARANG	366.263	1.253.840	564.640	843.794	520.510	559.707	665.108	660.509	511.008	535.416	596.877	298.212	7.375.884
		BELANJA MODAL	0	0	332.570	99.524	0	0	0	0	0	0	0	0	432.094
	013.01.WA.1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	878.664	1.773.640	1.417.010	1.976.118	1.040.310	1.079.507	1.697.908	1.180.309	1.030.808	1.055.216	1.116.677	810.212	15.056.379
		51 BELANJA PEGAWAI	512.401	519.800	519.800	1.032.800	519.800	519.800	1.032.800	519.800	519.800	519.800	519.800	512.000	7.248.401
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	366.263	1.253.840	564.640	843.794	520.510	559.707	665.108	660.509	511.008	535.416	596.877	298.212	7.375.884
		53 BELANJA MODAL	0	0	332.570	99.524	0	0	0	0	0	0	0	0	432.094

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal

ttd.

KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.667790/2024
IV A. B L O K I R**



DS:0495-2943-4000-5034

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667790] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

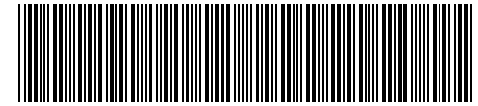
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal

ttd.
KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.01.2.667790/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:0495-2943-4000-5034

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667790] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

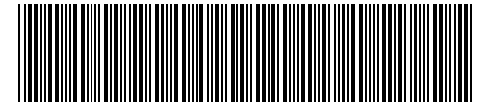
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Sekretaris Jenderal

ttd.
KOMJEN POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.667793/2024**



DS:6647-0624-0561-6080

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 3. Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 4. Kode/Nama Satker : (667793) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
- Sebesar : Rp. 2.492.562.000 (DUA MILIAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.492.562.000
013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.492.562.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 2.492.562.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAMUJU (178) Rp. 2.492.562.000

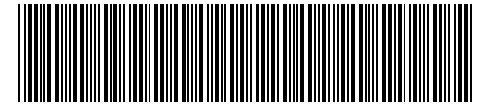
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.667793/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6647-0624-0561-6080

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667793) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.492.562.000
Kegiatan	:	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.492.562.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
		2. 01	Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah			
		3. 01	Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	1.887.439.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan	1.887.439.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara, Berkas Perkara	10.606.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,00	Perkara	10.606.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	594.517.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	4,00	Lembaga	594.517.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

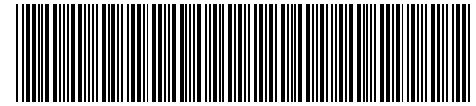
ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.03.2.667793/2024

I B. SUMBER DANA



DS:6647-0624-0561-6080

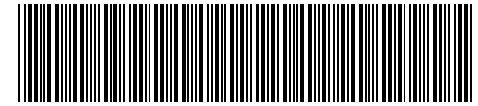
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
 Kode>Nama Satker : (667793) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	2.492.562.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	2.492.562.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.667793/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6647-0624-0561-6080

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667793) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT
Kewenangan : (KD)

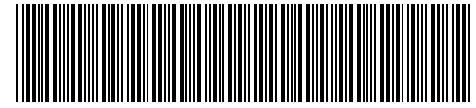
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
667793	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	-	2.492.562	-	-	-	2.492.562		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.492.562	-	-	-	2.492.562		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.492.562	-	-	-	2.492.562		
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	1.887.439	-	-	-	1.887.439	34 . 51	
04	PNBP	-	1.887.439	-	-	-	1.887.439	178	
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	10.606	-	-	-	10.606	34 . 51	
04	PNBP	-	10.606	-	-	-	10.606	178	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (34.51 SULAWESI BARAT / MAMUJU)	-	594.517	-	-	-	594.517	34 . 51	
04	PNBP	-	594.517	-	-	-	594.517	178	
JUMLAH		-	2.492.562	-	-	-	2.492.562		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.667793/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6647-0624-0561-6080

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (34) SULAWESI BARAT
Kode>Nama Satker : (667793) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	667793	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	111.374	503.790	343.858	228.046	302.630	349.675	168.613	160.405	154.580	142.357	27.235	2.492.562
		BELANJA BARANG	0	111.374	503.790	343.858	228.046	302.630	349.675	168.613	160.405	154.580	142.357	27.235	2.492.562
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	111.374	503.790	343.858	228.046	302.630	349.675	168.613	160.405	154.580	142.357	27.235	2.492.562
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	111.374	503.790	343.858	228.046	302.630	349.675	168.613	160.405	154.580	142.357	27.235	2.492.562

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.667793/2024
IV A. B L O K I R**



DS:6647-0624-0561-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667793] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.667793/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:6647-0624-0561-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT
Kode dan Nama Satker : [667793] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001